



Analisis Penyebab Ketidakeleengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo

Nur Suci Ramdhani*, Indah Muflihatin, Rossalina Adi Wijayanti, Gandu Eko Julianto Suyoso

Manajemen Informasi Kesehatan, Kesehatan, Politeknik Negeri Jember

*Correspondence: Nur Suci Ramdhani

Email: nursuciramdhani14@gmail.com

Received: 29-10-2024

Accepted: 06-05-2025

Published: 19-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Ketidakeleengkapan pengisian informed consent masih terjadi di Rumah Sakit Mitra Sehat dengan hasil penelitian diperoleh ketidakeleengkapan identitas keluarga pasien atau penanggungjawab pada item umur sebesar 27,1%, ketidakeleengkapan tertinggi di laporan penting pada item nama dokter, prognosis, dan estimasi biaya sebesar 21,4%, ketidakeleengkapan tertinggi di autentikasi pada item tanda tangan saksi 2 (Perawat/bidan) sebesar 47,1%. Tujuan penelitian ini adalah menimenganalisis faktor penyebab ketidakeleengkapan pengisian informed consent di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo berdasarkan faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor pendorong atau penguat Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan brainstorming. Subjek penelitian terdiri 3 dokter obgyn, 3 perawat bedah, 1 penanggungjawab rekam medis, 1 petugas assembling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas (dokter, assembling) kurang mengetahui standar keleengkapan informed consent serta petugas (dokter, perawat) tampak belum memahami tata cara pengisian informed consent, sikap petugas (dokter, perawat) kurang tanggungjawab dan disiplin dalam pengisian informed consent,

tidak adanya reward keleengkapan pengisian rekam medis, punishment yang diterapkan kurang maksimal. Saran yang dapat diusulkan yaitu diterapkannya sosialisai pentingnya sikap disiplin kepada petugas, menerapkan system reward dan punishment, mendistribusikan SOP, mencantumkan standar keleengkapan di SOP, melakukan telaah isi SOP dan mensosialisasikan isi SOP.

Katakunci: Informed Consent, Ketidakeleengkapan, Standar Pelayanan Minimal,

Pendahuluan

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat [1]. Pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib untuk menyelenggarakan rekam medis yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien [2]. Rekam medis dikatakan bermutu apabila pendokumentasian isi rekam medis tersebut akurat, lengkap, valid dan tepat waktu, serta mencerminkan cakupan layanan yang diberikan[3]. Salah satu lembar dalam dokumen rekam medis yang menjadi indikator mutu dalam standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu keleengkapan pengisian formulir *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas. *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang

diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada pasien [4].

Pentingnya kelengkapan data pada informed consent apabila terjadi kasus gugatan dari pasien, maka harus diisi selengkap-lengkapnyanya. Hal ini dapat membantu dokter sebagai alat bukti hukum saat dibutuhkan [5]. Ketentuan tersebut diterapkan pada setiap *informed consent*, tidak terkecuali pada tindakan bedah obsetri ginekologi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 29 Maret s/d 2 April 2024 dengan 70 berkas *informed consent* tindakan bedah obgyn peneliti menemukan adanya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obgyn pada bulan Oktober s/d November 2023. Berikut data ketidaklengkapan *informed consent* tindakan bedah obsetri ginekologi bulan oktober s/d november 2023 pada tabel 1. dibawah ini :

Tabel 1. Data Ketidaklengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Obsetri Ginekologi Bulan Oktober s/d November 2023

No	Keterangan	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
Identitas Pasien					
1.	Nama pasien	53	75,8%	17	24,2%
2.	Tanggal lahir	53	75,8%	17	24,2%
3.	No RM	51	72,9%	19	27,1%
4.	Jenis kelamin	47	67,1%	23	32,9%
5.	Alamat	50	71,4%	20	28,6%
Identitas Keluarga Pasien / Penanggung Jawab					
1.	Nama	69	98,6%	1	1,4%
2.	Umur	51	72,9%	19	27,1%
3.	Jenis kelamin	65	92,9%	5	7,1%
4.	Alamat	68	97,1%	2	2,9%
5.	Hubungan dengan pasien	37	52,9%	33	47.1
Laporan Penting					
1.	Nama dokter pelaksana	55	78,6%	15	21,4%
2.	Diagnosa	70	100%	0	0%
3.	Terapi/tindakan	68	97,1%	2	2,9%
4.	Indikasi terapi / tindakan Medis	64	91,4%	6	8,6%
5.	Tata cara	69	98,6%	1	1,4%
6.	Tujuan	64	91,4%	6	8,6%
7.	Risiko yang timbul	64	91,4%	6	8,6%
8.	Risiko / penyulit	62	88,6%	8	11,4%
9.	Komplikasi	59	84,2%	11	15,8%
10.	Prognosis	55	78,6%	15	21,4%
11.	Lain-lain / estimasi biaya	55	78,6%	15	21,4%
Autentifikasi					

1.	Tanda tangan dan nama terang dokter	54	77,1%	16	22,9%
2.	Tanda tangan dan nama terang pasien/wali	62	88,6%	8	11,4%
3.	Tanda tangan dan nama terang saksi 1 (keluarga)	56	80%	14	20%
4.	Tanda tangan dan nama terang saksi 2 (perawat/bidan)	37	52,9%	33	47,1%
5.	Tanggal, bulan dan jam persetujuan	62	88,6%	8	11,4%

Sumber: Data Primer Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi Bulan Oktober s/d Desember 2023

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa ditemukan data yang masih tidak terisi atau tanpa keterangan pada bagian penting terkait kelengkapan pengisiannya antara lain, identifikasi pada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, laporan penting, dan autentifikasi pada tandatangan saksi. Ketidaklengkapan tertinggi diidentifikasi pasien pada item jenis kelamin sebesar 32,9%, ketidaklengkapan tertinggi diidentifikasi keluarga pasien atau penanggungjawab pada item umur sebesar 27,1%, ketidaklengkapan tertinggi di laporan penting pada item nama dokter, prognosis, dan estimasi biaya sebesar 21,4%, ketidaklengkapan tertinggi di autentifikasi pada item tanda tangan saksi 2 (Perawat/bidan) sebesar 47,1%. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil dokumentasi ketidaklengkapan pengisian informed consent tindakan bedah obstetri ginekologi, dapat dilihat pada gambar 1. dibawah ini :

The image shows a medical informed consent form from 'Rumah Sakit MITRA SEHAT'. The form is titled 'DOKUMEN PEMBERIAN INFORMASI (DPI) OPERASI'. It contains various sections for patient information, diagnosis, treatment, risks, and consent. The form is signed by a doctor and a patient/wali. The form includes fields for name, age, gender, address, and date of consent. There are checkboxes for 'TANDA (V) & PARAF' and a section for 'PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS'. The form is signed by a doctor and a patient/wali.

Gambar 1. Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan Bedah

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, peneliti mendapatkan fenomena penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* obgyn salah satunya dokter terburu-buru dalam pengisiannya dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu tersebut disebabkan dokter juga melakukan praktik diluar Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo dan jumlah pasien yang harus ditangani. Hal ini sejalan dengan penelitian [6] ketidaklengkapan pengisian rekam medis, beban kerja dokter yang tinggi, ruang kerja dokter sehingga dokter tidak mempunyai tempat untuk mengisi rekam medis, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis. Perilaku petugas yang terburu-buru dalam pengisian rekam medis merupakan bentuk dari perilaku petugas. Menurut *Lawrence Green* (1980) dalam Notoatmodjo, (2014) bahwa perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factor*), dan faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factor*).

Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* dikarenakan dokter yang kurang disiplin dalam mengisi *informed consent* terutama pada bagian autentifikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian [7] yang mengatakan bahwa faktor utama penyebab ketidaklengkapan pengisian rekam medis yaitu ketidakdisiplinan dokter dalam mengisi formulir rekam medis. Faktor berikutnya yang menjadi penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yang dimana rumah sakit mitra sehat sudah terdapat SOP pengisian *informed consent* tindakan bedah tetapi belum diimplementasikan secara optimal sehingga petugas dalam pengisian masih terdapat ketidaklengkapan yang dimana diduga dapat menyebabkan salah satu penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent*. Salah satu penyebab ketidaklengkapan pengisian rekam medis terjadi karena kelengkapan pengisian rekam medis belum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada [8]. Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian laporan *informed consent* diatas dapat dikaitkan dengan perilaku seseorang yang dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factor*), dan faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factor*) (*Lawrence Green* (1980) dalam Notoatmodjo, (2014).

Dampak yang diakibatkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo akan berpengaruh terhadap menurunnya kualitas mutu rekam medis yang berdampak pada penilaian akreditasi dan dari aspek hukum. Akreditasi yang baik bagi pihak rumah sakit digunakan sebagai alat pemasaran yang dimana sebagai peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Dampak dari aspek hukum menjadi bukti hukum pasien dan juga dapat melindungi tenaga kesehatan/dokter dari tuntutan yang diajukan. Dampak tersebut tidak akan terjadi pada rumah sakit jika dalam pengisian formulir *informed consent* diisi dengan lengkap yang persentase kelengkapannya harus mencapai 100% yang dimana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti judul “Analisis Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo dengan menggunakan menggunakan faktor predisposisi (*predisposing factor*) yang meliputi pengetahuan dan sikap; faktor

pemungkin (*enabling factor*) yang meliputi fasilitas medis atau sarana dan prasarana, serta faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factor*) yang meliputi motivasi, *Standar Operating Procedure* (SOP) untuk menentukan rencana upaya perbaikan faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obsetri ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo menggunakan *brainstorming*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Jenis penelitian ini Merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan bedah obstetric ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo dengan menggunakan teori *Lawrence Green* yang meliputi faktor predisposisi (*predisposing factor*) yaitu pengetahuan dan sikap; faktor pemungkin (*enabling factor*) yaitu sarana dan prasarana, serta faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factor*) yang meliputi motivasi, *Standar Operating Procedure* (SOP), setelah itu dalam upaya rekomendasi serta saran menggunakan metode *brainstorming*.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo yang beralamat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji RT 02/RW 011 Kabupaten Situbondo. Telepon. 082333282112. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 7 bulan yang dimulai sejak Desember 2023 sampai dengan Juli 2024

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari 3 orang dokter spesialis obgyn sebagai pelaksana dan penanggungjawab pengisian *informed consent*, 3 orang perawat bedah sebagai saksi pemberian *informed consent* serta mengiatkan pengisian terisi lengkap, 1 orang penanggungjawab rekam medis sebagai penanggungjawab pengelolaan rekam medis dan coordinator KLPCM, 1 orang petugas assembling yang bertanggungjawab dalam pengecekan kelengkapan isi rekam medis

Objek Penelitian

Objek penelitian ini menggunakan formulir *informed consent* pasien rawat inap tindakan bedah obstetri ginekologi untuk mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian laporan *informed consent* pasien rawat inap tindakan bedah obstetri ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dengan menggunakan upaya penyelesaian masalah dengan metode *brainstorming*

Metode Analisis Data

Teknik analisis data dengan cara reduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang berkaitan dengan temuan terkait topic penelitian, penyajian data menggunakan teks yang bersifat naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa sumber yakni 3 orang Dokter spesialis obgyn selaku pengisian formulir *informed consent*, 1 orang petugas assembling selaku pengecekan formulir rekam medis, 3 orang perawat bedah sebagai penanggung jawab pengisian sekaligus saksi pemberian informasi persetujuan *informed consent*, serta 1 orang penanggung jawab rekam medis sekaligus koordinator KLPCM.

Hasil dan Pembahasan

Menganalisis Faktor Penyebab Ketidakeleengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi di Tinjau dari Variabel *Predisposing Factor* Di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo

Faktor predisposing (Faktor Predisposisi) pada penelitian ini membagi perilaku petugas dalam pengisian informed consent tindakan bedah obstetri ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo menjadi 2 yaitu pengetahuan dan sikap.

a. Pengetahuan

Peneliti membagi faktor Predisposisi terhadap perilaku dalam mengelola kelengkapan pengisian informed consent menjadi 2 yaitu pengetahuan dan sikap. Indikator pengetahuan dilihat dari pemahaman yang dimiliki oleh dokter yang bertanggungjawab dalam kelengkapan *informed consent* meliputi pemahaman terkait definisi *informed consent*, tujuan kelengkapan pengisian *informed consent*, kriteria *informed consent* yang dikatakan lengkap, tata cara pengisian *informed consent*, standar *informed consent*, serta dampak dari ketidakeleengkapan pengisian formulir *informed consent*. Pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini dapat terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu [9]. Pengetahuan seseorang mengenai rekam medis akan mempengaruhi dalam melakukan penyampaian informasi yang ada dalam rekam medis dan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi rumah sakit. Semakin tinggi pengetahuan maka akan semakin mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu dikarenakan akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan melakukan tindakan seperti dalam melakukan pengisian rekam medis yang mana akan diisi lengkap [10].

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan pengetahuan yang belum diketahui oleh petugas yakni mengenai standar persentase kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas Berikut hasil wawancara kepada dokter mengenai mengenai standar persentase kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas :

“lupa pokok intinya harus lengkap 100% dari pengisian awal semua harus lengkap 100%.”

Informan 1

“90 %, harusnya sih 100% kalau bisa ”

Informan 2

“Wadohh ga tau saya haaha”

Informan 3

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan disimpulkan bahwa terdapat 2 informan yang tidak mengetahui standar kelengkapan pengisian *informed consent* yakni 100%. Standar kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas yaitu sebesar 100% [11]. Kurangnya pengetahuan petugas terkait standar kelengkapan pengisian *informed consent* berpengaruh pada perilaku petugas akan menyebabkan petugas bertindak sesuai dengan tingkat pengetahuannya serta mempengaruhi perilaku mereka dalam pengisian *informed consent*. Target pekerjaan yang timbul akibat petugas tidak mengetahui terhadap standar kelengkapan pada pelaksanaan pemberian *informed consent* menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* [12]. Berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan pengetahuan petugas yang kurang mengenai standar persentase kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas menjadi faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo

Selain itu peneliti juga meneliti sikap yang dimiliki petugas dalam melempgkapi pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri ginekologi. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kesediaan petugas dalam double check *informed consent* setelah memberikan penjelasan kepada pasien, berikut kutipan wawancara :

“Ya”

Informan 1

“Kita selalu mengecek ulang pemberian ini *informed consent*, selalu di cek kok selalu diisi lengkap”

Informan 2

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dokter sudah melakukan double check *informed consent* tindakan bedah yang sudah dijelaskan kepada pasien sudah terisi lengkap. Berdasarkan hasil wawancara pada indikator sikap petugas sudah baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya dokter masih belum melakukan pengecekan rekam medis dan menganggap pelayanan lebih penting. Sikap tersebut akan berdampak pada perilaku petugas yang dimana dalam pengisian *informed consent* tidak lengkap. Sejalan dengan penelitian sugiyanto, (2019) dalam penelitian [13]] mengatakan bahwa sikap yang baik dan disiplin akan menghasilkan kelengkapan pengisian *informed consent* 100% sehingga sikap seseorang tersebut dapat membentuk niat dalam melakukan suatu tindakan. Peneliti mengusulkan sebaiknya dokter melakukan recheck ulang kelengkapan *informed consent* sebelum pasien ke ruang perawatan, selain itu ada petugas

yang kurang bertanggungjawab dan kurang disiplin dapat ditegur untuk mengisi secara lengkap jika terus menerus tidak lengkap dapat diberikan adanya *punishment*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap petugas yang tidak melakukan pengecekan kembali rekam medis ini dapat menjadi faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent*

Menganalisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi di Tinjau dari Variabel EnablingFactor Di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo

Enabling Factor (Faktor pemungkin) dalam penelitian ini yakni sarana dan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seorang petugas memiliki perilaku yang diduga sebagai penyebab terjadinya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri ginekologi. Faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik berupa ketersediaan sarana dan prasarana [9]. Peneliti membagi *enabling factor* perilaku petugas dalam melaksanakan pengisian *informed consent* menjadi 2 yaitu sarana (*formulir informed consent*) dan prasarana (ruang kerja).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai indikator sarana didapatkan bahwa formulir yang tersedia tidak ada item yang membingungkan dan sudah memudahkan pengisian formulir *informed consent*. berikut hasil wawancara mengenai formulir informed consent di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo.

"Jelas sih kataku mudah dimengerti"

Informan 2

Informan 2 menyatakan bahwa formulir *informed consent* di Rumah Sakit Mitra Sehat sudah jelas dan mudah dimengerti. Kejelasan item-item pada *informed consent* tidak menjadi hambatan atau masalah petugas dalam melengkapi pengisian formulir persetujuan tersebut. Item-item yang ada di formulir *informed consent* sudah lengkap terdiri dari item identifikasi pasien, laporan penting, dan autentifikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian [14] bahwa formulir *informed consent* memiliki 3 item yaitu identifikasi pasien, laporan penting, dan autentifikasi. Formulir di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo sudah sesuai dengan isi data formulir persetujuan tindakan sudah mencakup, diagnosis dan tatacara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran, alternatif tindakan dan risiko, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan alternative (perkiraan biaya) [15]. Berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa formulir *informed consent* tidak menjadi faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent*.

Selain sarana, prasarana juga berhubungan dengan perilaku kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah obstetri ginekologi. Indikator prasarana dalam penelitian ini yaitu ruang kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Berdasarkan triangulasi teknik bahwa di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo sudah tersedia ruang kerja tersendiri setiap petugas dan ruang yang tersedia sudah nyaman, berikut hasil wawancara :

"Tersedia kok ruang kerjanya"

Informan 7

“Nyaman”

Informan 3

Pernyataan diatas disimpulkan sudah tersedia ruang kerja di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo dan ruang kerja tersendiri setiap petugas dan ruang kerja yang sudah tersedia sudah nyaman. Kenyaman ruang kerja bagi petugas berpengaruh terhadap perilaku petugas dalam pengisian informed consent secara lengkap. Suatu ruang kerja yang nyaman dapat mempengaruhi perilaku petugas dalam pengisian *informed consent*, ruang kerja menggambarkan bahwa lingkungan tempat kerja dapat mempengaruhi atau meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian[16] mengatakan bahwa ruang kerja dan tata letak yang baik dapat memberikan kenyamanan secara fisik, maupun sosial psikologis sehingga mutu pelayanan akan meningkat . Hal ini juga didukung dengan penelitian[16]] menyatakan bahwa ruang kerja dan fasilitas yang lengkap akan mendorong suatu pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, merasa senang dan tidak malas sehingga memacu semangat seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bahwa ruang kerja tidak menjadi salah satu faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetric ginekologi. Ruang kerja yang tersedia sudah nyaman dan kenyamanan ruang kerja tersebut dapat menumbuhkan rasa semangat dalam dalam bekerja terkait kelengkapan pengisian *informed consent*

Menganalisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi di Tinjau dari Variabel Reinforcing Factor Di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo

Faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya sikap dan perilaku yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan yang menjadi acuan sebagai pendorong atau penguat terjadinya sikap dan perilaku petugas. Faktor ini terwujud dalam pemberian motivasi dan *standart operational prosedure* tentang pengisian formulir *informed consent* tindakan bedah obstetri ginekologi.

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu [17]. Peneliti membagi 2 indikator motivasi yakni *reward* dan *punishment*. *Reward* dalam hal ini merujuk pada penghargaan atau apresiasi apabila petugas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada dan telah mencapai target dalam hal kelengkapan dan pengisian secara lengkap formulir *informed consent*. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas didapatkan bahwa belum tersedia reward terkait kelengkapan pengisian *informed consent*. berikut hasil wawancara kepada petugas:

“Ga ada kalau *informed consent* kan semua dituntut untuk bisa memberikan informasi yang benar ke pasien”

Informan 4

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Mitra Sehat belum ada pemberian *reward* kepada petugas terkait kelengkapan pengisian *informed consen*. Reward

perlu diberikan untuk meningkatkan motivasi petugas agar perilaku dalam pengisian informed consent terisi lengkap, dengan demikian tidak adanya reward dapat membuat petugas kurang maksimal dan kurang semangat dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Pemberian reward sangat dibutuhkan oleh petugas yang terlibat dalam pengisian rekam medis supaya meningkatkan kinerjanya dalam pengisian rekam medis, dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengisi rekam medis dengan lengkap [18]. Selaras dengan penelitian [12] bahwa pemberian *reward* yang diberikan kepada petugas dapat memicu tekad seseorang menjadi lebih giat dalam usahanya memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai dan meningkatkan tanggungjawab terhadap kelengkapan rekam medis. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo belum ada pemberian *reward* kepada petugas terkait kelengkapan pengisian *informed consent* dapat dikatakan reward menjadi salah satu faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo.

Selain itu peneliti juga meneliti ketersediaan punishment. Menurut Sugihen (2017) dalam penelitian [18] bahwa *Punishment* (Sanksi) adalah pemberian hukuman sebagai efek jera yang sengaja diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran disiplin atau aturan kerja yang berlaku. *Punishment* dalam hal ini merujuk pada hukuman yang diberikan kepada petugas terkait ketidaklengkapan pengisian informed consent tindakan bedah obstetri ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo. Hasil wawancara peneliti kepada petugas mengenai pemberian *punishment* dalam hal ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo, ditunjukkan oleh kutipan wawancara sebagai berikut:

"Punishment ada cuma teguran tapi ga sampek surat peringatan."

Informan 1

Informan 1 menyatakan bahwa sudah menerapkan *punishment* hanya berupa teguran kepada petugas dalam ketidaklengkapan pengisian *informed consent*. *Punishment* berupa teguran lisan yang dimana tidak mendorong perilaku petugas untuk mengisi informed consent secara lengkap sehingga dengan adanya teguran tersebut kejadian ketidaklengkapan pengisian informed consent masih terjadi. Hasil observasi masih terdapat ketidaklengkapan pengisian *informed consent* maka sanksi tegas perlu diterapkan terhadap petugas yang melakukan kerja tidak maksimal supaya termotivasi untuk mengisi secara lengkap sehingga meminimalisir terjadinya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri ginekologi. Sejalan dengan penelitian Hernandita (2017) dalam [20] mengatakan bahwa belum adanya sanksi tegas yang dimana antar petugas jika terdapat kesalahan dalam pengisian hanya saling mengiatkan sehingga belum membawa perubahan signifikan petugas untuk melengkapi rekam medis dengan lebih teliti. Berdasarkan hasil keseluruhan didapatkan bahwa *punishment* berupa teguran lisan menjadi salah satu faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah yang dimana teguran yang diberikan dirasa kurang optimal dalam meminimalisir ketidaklengkapan pengisian informed consent.

Standar Operating Procedure dalam penelitian ini yaitu prosedur kerja atau kebijakan yang berkaitan dengan pengisian informed consent berisi langkah-langkah yang diberikan dalam menyelesaikan suatu proses kerja terkait pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo. Peneliti menanyakan kepada informan terkait ketersediaan *Standar Operating Procedure* (SOP) pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo. Berikut hasil wawancara kepada informan :

“Ada sih kayaknya ya, setahu saya ada sih tapi ga tau bentuknya kek gimana”

Informan 3

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sudah terdapat SOP pengisian informed consent namun tidak semua petugas mengetahui bentuk dan isi dari SOP. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil dokumentasi terkait ketersediaan SOP Pengisian Informed Consent 2. dibawah ini :

PENGISIAN INFORMED CONSENT		
 Rumah Sakit MITRA SEHAT	No. Dokumen 352/ZPO/BSMS/II/2017	No. Revisi 00
	Halaman 1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 01 Februari 2017	 dr. Divya
PENGERTIAN	Pengisian informed consent merupakan suatu prosedur yang harus dilaksanakan sebelum diberikan atau dilaksanakan tindakan medis terhadap pasien yang berupa pengisian terhadap formulir persetujuan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga yang mewakili.	
TUJUAN	1. Sebagai acuan untuk langkah-langkah pengisian informed consent 2. Sebagai bukti persetujuan dilakukan tindakan medis yang bersifat legal.	
KEBIJAKAN	Permenkes No 290/MENKES/Per/II/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran L11/No. 29 tahun 2004 pasal 45 ayat 1	
PROSEDUR	1. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien 2. Jika pasien memerlukan tindakan medis yang mengancam nyawa pasien, maka dokter memberikan informasi medis yang jelas kepada pasien atau keluarga terdekat pasien 3. Informasi medis yang harus disampaikan oleh dokter kepada pasien meliputi hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, tatalaksana klinisnya tindakan yang akan diberikan serta risiko medis yang mungkin terjadi pada pasien akibat dari tindakan tersebut. 4. Penjelasan diberikan secara lisan dan dituliskan pada rekam medis 5. Setelah pemberian informasi medis secara detail pasien atau keluarga pasien yang mewakili diminta untuk mengisi identitas pasien atau keluarga yang mewakili serta menandatangani dengan menyebutkan nama terang dibawahnya pada lembar informed consent 6. Tindakan dilakukan jika sudah mendapat persetujuan dari pasien atau keluarganya.	
UNIT TERKAIT	1. Unit gawat darurat 2. Unit rawat jalan 3. Unit rawat inap 4. Unit kamar operasi	

Gambar 2. SOP Pengisian *Informed Consent*

Ketidakhahaman bentuk dan isi dari SOP pengisian *informed consent* akan berpengaruh pada perilaku petugas terkait pengisian informed consent sehingga menyebabkan ketidaklengkapan pengisian informed consent, keberadaan SOP bagi petugas sebagai pedoman penatalaksanaan dan langkah-langkah pemberian informasi dan penjelasan kepada pasien. Sejalan dengan penelitian wijayanti (2019) dalam [21] SOP merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dibuat oleh suatu instansi sebagai acuan bagi petugas dalam melakukan tugasnya dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi mengenai kelengkapan pengisian informed consent

Menentukan Upaya Perbaikan Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Informed consent Tindakan Bedah Obsetri Ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo Menggunakan Metode Brainstorming

Penentuan upaya perbaikan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode *brainstorming* bersama dengan 8 informan untuk menentukan rencana upaya perbaikan faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obsetri

ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo. Berikut adalah permasalahan dan upaya penyelesaian yang peneliti dapat terkait penyebab ketidaklengkapan pengisian informed consent di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo seperti pada tabel 2. berikut ini

Tabel 2. Hasil *Brainstorming*

Penyebab Masalah	Upaya Solusi
Variabel pengetahuan	
Kurangnya pengetahuan petugas (dokter, perawat, assembling) terkait standar kelengkapan pengisian <i>informed consent</i> dan tata cara pengisian informed consent	Bisa mengadakan seminar atau workshop serta pelatihan yang wajib dihadiri oleh seluruh petugas yang ikut berperan sebagai pengecekan, pengisian rekam medis salah satunya ya <i>informed consent</i> itu supaya menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sehingga dapat mengurangi ketidaklengkapan rekam medis pasien.
Variabel Sikap	
Petugas (dokter, perawat) yang kurang tanggungjawab dan kurang disiplin dalam pengisian <i>informed consent</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kedisiplinan dan tanggungjawab dalam pengisian <i>informed consent</i> kepada petugas 2. Bisa menerapkan evaluasi secara berkala ini bisa dibantu oleh pokja akreditasi 3. Petugas saling mengingatkan satu sama lain terkait kelengkapan pengisian rekam medis terutama <i>informed consent</i>.
Variabel Reward dan Punishment	
Tidak adanya pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) kepada petugas dalam pengisian <i>informed consent</i> tindakan bedah obstetri ginekologi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solusi ya bisa menerapkan adanya <i>reward</i> bagi petugas yang taat aturan dan tanggung jawab semacam hadiah lah ya. 2. Kalo kelengkapan Bisa menerapkan adanya <i>punishment</i> yang tegas seperti surat peringatan jika melakukan lebih dari 3 kali bagi petugas yang melanggar peraturan dan kurang tanggung jawab itu aja.
Variabel SOP Pengisian <i>Informed Consent</i>	
Tidak adanya sosialisasi SOP pengisian <i>informed consent</i> dan pengimplementasian SOP kurang maksimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengisian <i>informed consent</i> yang ada bisa didistribusikan ke ruangan supaya petugas mengetahui kalo ada SOP ini ini. 2. Mengadakan sosialisasi isi SOP pengisian <i>informed consent</i> secara intensif bagi perawat, dokter, dan petugas yang terkait dengan pengecekan kelengkapan rekam medis baik yang sudah lama bekerja maupun yang baru dan memberikan SOP pengisian kepada unit terkait.

Tabel 2. menjelaskan bahwa upaya perbaikan pada subvariabel pengetahuan dengan cara mengadakan seminar atau workshop serta pelatihan bagi petugas. Upaya perbaikan pada subvariabel sikap dengan cara sosialisasi kedisiplinan dan tanggungjawab dalam pengisian *informed consent* kepada petugas, tanggungjawab pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis, evaluasi secara berkala, serta petugas saling mengingatkan terkait kelengkapan pengisian rekam medis. Upaya pada subvariabel reward dengan menerapkan

adanya *reward* bagi petugas yang taat aturan dan tanggung jawab semacam hadiah. Upaya Upaya perbaikan pada subvariabel punishment menerapkan adanya *punishment* yang tegas seperti surat peringatan jika melakukan lebih dari 3 kali bagi petugas yang melanggar peraturan dan kurang tanggung jawab. Serta upaya pada subvariabel SOP Pengisian *Informed Consent* dengan cara SOP Pengisian *Informed Consent* didistribusikan ke ruangan, dan mengadakan sosialisasi isi SOP pengisian *informed consent* secara intensif bagi perawat, dokter, dan petugas yang terkait dengan pengecekan kelengkapan rekam medis.

Kesimpulan

Berdasarkan predisposing factors (faktor predisposisi) bahwa kurangnya pengetahuan petugas terkait standar kelengkapan pengisian informed consent dan tata cara pengisian informed consent serta pada sikap petugas yang menganggap pelayanan lebih penting yang dimana dapat menyebabkan ketidaklengkapan pengisian informed consent. Berdasarkan enabling factor (faktor penguat) tidak menjadi faktor penyebab ketidaklengkapan dikarenakan Rumah Sakit sudah tersedia ruang kerja bagi petugas tersendiri dan ruang kerjanya sudah nyaman serta formulir informed consent sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang ada. Berdasarkan reinforcing factor (faktor pendorong) bahwa Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo belum ada pemberian reward kepada petugas terkait kelengkapan pengisian informed consent, serta punishment di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo berupa teguran lisan yang kurang optimal, serta Standar Operating Procedure (SOP) Pengisian Informed Consent tidak disosialisasikan kepada semua unit terkait (dokter, perawat, petugas assembling) dan belum tercantum standar kelengkapan pengisian informed consent.

Berdasarkan hasil brainstorming upaya perbaikan yang diperoleh yaitu mengadakan seminar atau workshop serta pelatihan kepada seluruh petugas yang ikut berperan sebagai pengecekan, pengisian rekam medis salah satunya ya informed consent, meningkatkan sikap disiplin dan tanggungjawab kepada diri sendiri, menerapkan evaluasi secara berkala, petugas saling mengiatkan satu sama lain terkait kelengkapan pengisian rekam medis terutama informed consent, menerapkan adanya reward bagi petugas yang taat aturan dan tanggung jawab berupa hadiah, menerapkan adanya punishment yang tegas seperti surat peringatan jika melakukan lebih dari 3 kali bagi petugas yang melanggar peraturan dan kurang tanggung jawab, SOP pengisian informed consent yang ada bisa didistribusikan ke ruangan, mengadakan sosialisasi isi SOP pengisian informed consent secara intensif bagi perawat, dokter, dan petugas yang terkait dengan pengecekan kelengkapan rekam medis baik yang sudah lama bekerja maupun yang baru. Sedangkan saran yang peneliti berikan kepada rumah sakit Mitra Sehat Situbondo yaitu sosialisasi kedisiplinan dan tanggungjawab dalam pengisian informed consent kepada petugas serta petugas saling mengiatkan satu sama lain tentang pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis, menerapkan system reward dan punishment yang tegas, melakukan telaah isi SOP dengan mencantumkan standar kelengkapan pengisian informed consent di SOP serta menginformasikan dan mendistribusikan SOP kepada petugas yang berkaitan.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta, Indonesia, 2019.
- [2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerumahaSakit. Jakarta, Indonesia, 2021.
- [3] A. Haqqi, N. N. Aini, and A. P. Wicaksono, "Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap di RS Universitas Airlangga," *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 1, no. 4, pp. 493–501, 2020, doi: 10.25047/j-remi.v1i4.2158.
- [4] E. Simanjuntak and S. A. Wismona, "Analisis Kelengkapan Informed Consent Pasien Pra Operasi Katarak di RS Khusus Mata SMEC," *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda*, vol. 3, no. 2, pp. 444–446, 2018.
- [5] N. Gustina, F. Fauziah, and R. S. Agustina, "Pemberian Informed Consent dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 78–88, 2022, doi: 10.51825/sjp.v2i1.15780.
- [6] D. Oktavia, Hardisman, and Erkadius, "Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang," *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 17–24, 2020, doi: 10.33560/jmiki.v8i1.246.
- [7] N. K. Ana, N. Novita, and W. S. Maya, "Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Rekam Medis Rawat Inap di RSUD dr. Saiful Anwar Malang," *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 2, no. 1, pp. 96–104, 2020, doi: 10.25047/j-remi.v2i1.2080.
- [8] R. Desi, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Resume Medis Pasien Rawat Inap," *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, vol. 7, no. 1, pp. 69–73, 2018, doi: 10.30994/sjik.v7i1.153.
- [9] M. Pakpahan, S. Deborah, S. Andi, Tasmin, M. R. Ramdany, and E. I. Manurung, *Promosi Kesehatan & Perilaku Kesehatan*. Medan, Indonesia: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [10] R. L. Beatrice, "Hubungan Pengetahuan Nilai Guna Rekam Medis dengan Perilaku Pengisian Rekam Medis oleh Perawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2022," *Undergraduate Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth, Medan, Indonesia*, 2023.
- [11] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta, Indonesia, 2008.
- [12] S. Ardiyanti, "Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) di Rumah Sakit Paru Jember," *Undergraduate Thesis, Politeknik Negeri Jember, Jember, Indonesia*, 2022.
- [13] W. Yokarina, J. Yanuar, W. Cicilia, and R. D. Sri, "Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Pengisian Rekam Medis Elektronik Oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Dalam Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional

- di Rumah Sakit Hermina Jatinegara," *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, vol. 8, no. 2, pp. 212–223, 2024, doi: 10.52643/marsi.v8i2.4271.
- [14] Nurmayantih, A. R. Nanda, H. P. Daniel, and F. Puteri, "Analisis Kuantitatif Informed Consent pada Tindakan Sectio Caesarea di Rumah Sakit Patria IKKT Jakarta Barat," *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 34–40, 2022, doi: 10.55123/sehatmas.v1i1.32.
- [15] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta, Indonesia, 2008.
- [16] P. E. Herdina and E. R. Meylia, "Pengaruh Tata Ruang Kantor dan Lingkungan Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya," *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2018.
- [17] M. Husni, "Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Motivasi terhadap Kepatuhan Dokter dalam Penulisan Diagnosis pada Resume Medis di RS Zahirah 2018," *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, vol. 4, no. 3, pp. 186–196, 2018, doi: 10.7454/arsi.v4i3.2623.
- [18] H. F. Aghasi, A. W. Rossalina, N. Novita, and R. D. C. Dewi, "Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Babadan Kabupaten Ponorogo," *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 4, no. 2, pp. 92–101, 2023, doi: 10.25047/j-remi.v4i2.3831.
- [19] N. Kamil, D. S. H. Putra, F. Erawantini, and N. Muna, "Evaluasi Kinerja Petugas Distribusi Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD dr. Saiful Anwar Malang," *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 2, no. 1, pp. 158–165, 2020, doi: 10.25047/j-remi.v2i1.2077.
- [20] G. W. Marselinus, P. D. K. H. I., and K. Y. S. Ni, "Analisis Kelengkapan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Kuta Utara," *Archives of Community Health*, vol. 9, no. 3, pp. 487–495, 2022, doi: 10.24843/ACH.2022.v09.i03.p10.
- [21] D. M. W. N. Made, "Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Identifikasi Pasien pada Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pandanwangi Malang," *Undergraduate Thesis, Politeknik Negeri Jember, Jember, Indonesia*, 2022.
- [22] N. D. S. Ismawati, S. Supriyanto, S. Haksama, and C. Hadi, "The Influence of Knowledge and Perceptions of Doctors on the Quality of Medical Records," *Journal of Public Health Research*, vol. 10, no. 2, 2021, doi: 10.4081/jphr.2021.2228.
- [23] Yastori, "Completeness of Informed Consent in Supporting National Standard Accreditation of Patient and Family Rights 5 Hospitals at Ropanasuri Surgical Special Hospital in Padang," *International Journal of Community Medicine and Public Health*, vol. 6, no. 11, pp. 4782–4786, 2019, doi: 10.18203/2394-6040.ijcmph20195034.
- [24] S. Noble, J. Donovan, E. Turner, C. Metcalfe, A. Lane, M.-A. Rowlands, D. Neal, F. Hamdy, Y. Ben-Shlomo, and R. Martin, "Feasibility and Cost of Obtaining Informed Consent for Essential Review of Medical Records in Large-Scale Health Services Research," *Journal of Health Services Research & Policy*, vol. 14, no. 2, pp. 77–81, 2009, doi: 10.1258/jhsrp.2008.008085.

-
- [25] B. Campbell, H. Thomson, J. Slater, C. Coward, K. Wyatt, and K. Sweeney, "Extracting Information from Hospital Records: What Patients Think About Consent," *Quality & Safety in Health Care*, vol. 16, no. 6, pp. 404–408, 2007, doi: 10.1136/qshc.2006.020313.